



2022



**INDEKS
PEMBANGUNAN
MANUSIA
KABUPATEN LAMONGAN**



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LAMONGAN**



2022



**INDEKS
PEMBANGUNAN
MANUSIA
KABUPATEN LAMONGAN**

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN LAMONGAN 2022

ISBN : -

No.Publikasi : 35240.2234

Katalog BPS : 4102002.3524

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman : viii + 50 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan

Diterbitkan Oleh:

©BPS Kabupaten Lamongan

Sumber Ilustrasi :

Canva.com

Freepik.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau meng-
gandakan sebagian atau seluruh isi buku untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis
dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN LAMONGAN 2022**

Pengarah:

Bagyo Trilaksono, S.P, M.M

Penanggung Jawab:

Bagyo Trilaksono, S.P, M.M

Penyunting:

Yati Andriyani, S.ST

Penulis dan Pengolah Data:

Yulia Dwi Pramu Sinta, S.ST

Desain Kover dan Tata Letak:

Yulia Dwi Pramu Sinta, S.ST



Kata Pengantar

Paradigma pembangunan saat ini terbagi atas pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia. Pembangunan ekonomi menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai ukuran capaian pembangunan, sementara pembangunan manusia menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur hal yang sama. BPS menghitung dan menyajikan kedua indikator tersebut sebagai indikator pembangunan yang saling melengkapi.

Metodologi penghitungan IPM terus mengalami penyempurnaan menyesuaikan ketersediaan indikator dan kemajuan ilmu pengetahuan modern. Sehingga, IPM mampu menjadi indikator pembangunan manusia yang handal untuk mengukur perluasan pilihan-pilihan manusia. Publikasi ini bukan hanya memuat angka IPM terbaru, namun juga merekam perubahan metodologi penghitungan, ulasan masing-masing dimensi pembentuk IPM, dan pembangunan gender.

Terima kasih yang sebesar-besarnya diucapkan kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya publikasi ini. Kritik dan saran guna perbaikan penerbitan publikasi selanjutnya sangat kami harapkan.

Lamongan, Desember 2022

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Lamongan

Bagyo Trilaksono, S.P., M.M



Daftar Isi

	Hal
1. Pendahuluan	1
2. Metodologi	11
3. Potret pembangunan Manusia	23
4. Pembangunan Manusia di Lamongan	27
5. Kesehatan	31
6. Pendidikan	37
7. Kehidupan yang Layak	43
8. Pembangunan Gender	47

Pendahuluan

1

1.1 Latar Belakang

Paradigma pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai titik sentral (*people centered development*), sehingga setiap upaya pembangunan mempunyai ciri dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat, bukan hanya sebagai alat untuk mencapai hasil akhir pembangunan, tetapi sebagai tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri. Maka dalam kerangka pembangunan manusia ini perlu diupayakan peningkatan kualitas penduduk sebagai sumber daya pembangunan, baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (berdaya beli), serta aspek moralitas (iman dan taqwa), sehingga berdampak positif pada peningkatan partisipasi penduduk dalam pembangunan.

Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang termaktub dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan ini secara implisit juga mengandung makna pemberdayaan penduduk, baik sebagai subyek pembangunan maupun sebagai obyek pembangunan.

Manusia sesungguhnya merupakan aset paling berharga suatu negara (*People are the real wealth of a nation*). Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi



Gambar 1.1 Foto Keluarga



“Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator *outcome* pembangunan nasional dengan manusia itu sendiri tidak hanya sebagai subyek melainkan sekaligus sebagai obyek pembangunan”



Gambar 1.2 Siswa Berseragam Pramuka

“Membangun manusia berarti membangun harapan berumur panjang, sehat, pilihan pendidikan yang berkualitas serta menjamin kesejahteraan ekonomi dengan pemerataan pendapatan”

rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan sederhana. Tetapi hal ini sering terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang (HDR, 1990).

Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan – pilihan yang dimiliki manusia (*enlarging the choices of people*). Diantara berbagai pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Berbagai pilihan lain yang tak kalah penting adalah kebebasan berpolitik, jaminan atas hak asasi dan harga diri. Dengan demikian pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan peningkatan kemampuan manusia, seperti meningkatkan kesehatan dan pendidikan. Namun, pembangunan juga harus menciptakan peluang dan kesempatan agar setiap orang dengan kemampuannya bisa berpartisipasi dalam pembangunan.

Pembangunan manusia juga harus memungkinkan manusia, dengan kemampuan yang dimilikinya, untuk bersenang-senang, untuk melakukan kegiatan produktif, atau untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan budaya, sosial dan politik. Pembangunan manusia harus menyeimbangkan semua aspek tersebut agar kesejahteraan dapat tercapai dengan baik. Inilah

mengapa di dalam proses pembangunan manusia, manusia tidak hanya dipandang sebagai pelaku, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan itu sendiri.

Pembangunan manusia jika dilihat dari sisi pelaku dan sasaran merupakan model pembangunan tentang penduduk, untuk penduduk, dan oleh penduduk. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tentang penduduk : Berupa investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial budaya lainnya.
2. Untuk penduduk : berupa penciptaan peluang kerja melalui perluasan (pertumbuhan) ekonomi dalam negeri.
3. Oleh penduduk : berupa upaya pemberdayaan penduduk dalam menentukan harkat manusia dengan cara berpartisipasi dalam proses politik dan pembangunan.

Paradigma pembangunan manusia mengandung empat komponen utama :

1. Produktivitas

Manusia harus berdaya untuk meningkatkan produktifitasnya dan berpartisipasi penuh dalam proses mencari penghasilan dan lapangan kerja. Oleh karenanya, pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia.

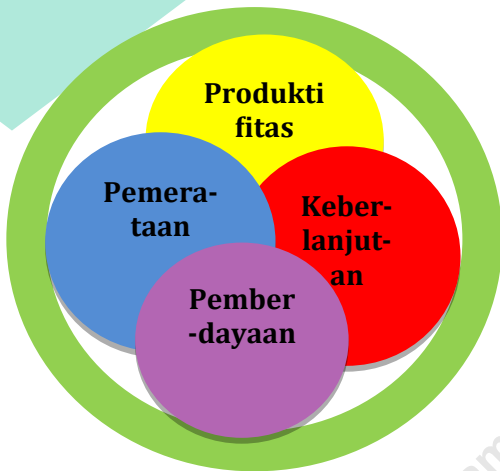
2. Pemerataan

Setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi



Gambar 1.3 Pasukan Pengibar Bendera

“Tiga unsur utama yang menjadi landasan pembangunan manusia di Indonesia adalah tentang kependudukan, untuk penduduk itu sendiri, dan dilaksanakan oleh penduduk”



Bagan 1. Empat Komponen Utama Pembangunan Ekonomi

dan politik harus dihapuskan sehingga semua orang dapat berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan dari kesempatan ekonomi yang tersedia.

3. Keberlanjutan

Akses terhadap peluang atau kesempatan harus mempertimbangkan bukan hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Semua bentuk sumberdaya fisik harus dapat diperbaharui. Karena generasi yang akan datang merupakan generasi penerus yang tentu ingin menikmati hasil pembangunan juga. Aspek keberlanjutan pembangunan ini merupakan upaya agar generasi masa depan semakin merasakan dampak positif pembangunan masa kini.

4. Pemberdayaan

Pembangunan harus dilakukan oleh semua orang, bukannya semata-mata (dilakukan) untuk semua orang. Semua orang harus berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dan proses didalamnya yang akan mempengaruhi kehidupan mereka. Semua orang harus mengambil peran dan fungsi masing-masing sehingga pembangunan dapat dilakukan lebih cepat disertai oleh pengawasan agar lebih tepat sasaran.

Aspek pemberdayaan dalam proses pembangunan akan menjamin efektivitas dan efisiensi pembangunan. Monitoring dan evaluasi pembangunan juga dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga kebijakan yang berjalan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.

1.2. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan manusia di suatu wilayah (UNDP, 1998). Dalam hal ini IPM pada tahun tertentu merupakan gambaran dari upaya pembangunan yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya.

Agar hasil pembangunan antar daerah dapat dibandingkan, maka dibutuhkan alat ukur hasil pembangunan manusia tersebut. Sebelum tahun 1970-an, alat ukur keberhasilan pembangunan biasanya menggunakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kenyataannya, meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dicapai oleh negara-negara berkembang (termasuk Indonesia), namun taraf hidup penduduknya tidak ikut meningkat. Oleh karena itu, para pakar merumuskan konsep baru dalam mengukur pembangunan suatu negara yang berorientasi pada manusia.

Konsep ini mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara tidak hanya dari tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi semata, tetapi mencakup pula kualitas manusianya. Inilah tantangan yang harus dihadapi, yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi mampu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan mampu meningkatkan kualitas mereka sebagai manusia.

Sejak tahun 1990, angka IPM telah menjadi salah satu indikator yang mencerminkan progres kemajuan suatu bangsa. Setiap tahun UNDP



Gambar 1.4 Aktivitas Belajar Mengajar



Tantangan pembangunan suatu negara adalah bagaimana hasil dari pembangunan itu dapat dinikmati dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat dan mampu meningkatkan kualitas mereka sebagai manusia.



Gambar 1.5 Aktivitas Olahraga

“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ringkasan mengenai tingkat kemajuan sosial dan ekonomi dan berfungsi sebagai indikator evaluasi tiga dimensi dasar, lamanya hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak”

menerbitkan laporan mengenai progress pembangunan manusia melalui *Human Development Report* (HDR). Dalam laporan tersebut, 187 negara yang tercakup di dalamnya sudah terukur capaian IPM beserta semua komponen pembentuknya. Secara internasional, terdapat pembagian kelompok negara-negara berdasarkan nilai IPM-nya, yaitu kelompok sangat tinggi, kelompok tinggi, kelompok menengah, dan kelompok rendah.

IPM mengukur tingkat pencapaian keseluruhan dari suatu wilayah negara/provinsi/kabupaten/kota dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup, pengetahuan, dan suatu standar hidup yang layak. Ketiganya diukur dengan angka harapan hidup, pencapaian pendidikan dan pendapatan perkapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. (UNDP : *Human Development Report 2001*).

Lebih lanjut UNDP menyatakan bahwa IPM adalah suatu ringkasan dan bukan suatu ukuran komprehensif dari pembangunan manusia. IPM memang dirancang untuk mengukur tingkat kemajuan sosial ekonomi suatu wilayah, namun IPM hanya memberi indikasi mengenai hal tersebut saja. Meski demikian, menghitung IPM merupakan langkah maju daripada langkah terdahulu yang hanya terkonsentrasi pada tingkat pendapatan saja.

Tinggi rendahnya nilai IPM juga dapat menjelaskan program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Namun perlu disadari, perubahan atau peningkatan angka IPM tidak

bisa terjadi secara instan. Pembangunan manusia merupakan sebuah proses dan tidak bisa diukur dalam waktu singkat. Berbeda dengan pembangunan ekonomi pada umumnya, hasil pembangunan pendidikan dan kesehatan tidak bisa dilihat dalam jangka pendek.

Untuk itu, dalam rangka melihat kemajuan pembangunan dalam jangka menengah, publikasi ini dilengkapi dengan analisis mengenai capaian dan kemajuan IPM dan komponen IPM pada tahun 2016-2021. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan potret atau profil suatu wilayah baik secara komprehensif maupun secara sektoral berdasarkan capaian pembangunan manusianya.

Analisis deskriptif pembangunan manusia yang disajikan merupakan gambaran tentang keadaan pembangunan manusia, yaitu gambaran yang tidak saja berkaitan dengan gambaran capaian tentang kesejahteraan dan kualitas fisik sumber daya manusia, tetapi juga gambaran yang berkaitan dengan berbagai aspek sosial dari penduduk.

Dengan adanya penggambaran ini, pengambil keputusan dan perumus kebijakan akan dapat bekerja secara lebih mendasar dan lebih terarah. Penentuan prioritas misalnya dapat dilakukan secara lebih mudah, oleh karena berbagai informasi yang diperlukan pada proses perencanaan pembangunan telah tersedia.

1.3. Ruang Lingkup

Secara khusus, publikasi ini menyajikan:

1. Metodologi pengukuran pembangunan manusia;
2. Pencapaian Pembangunan Manusia di Lamongan;



Gambar 1.6 Potret Anak-anak Ceria

“Pembangunan manusia pada dasarnya menggambarkan dampak pembangunan di bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan perekonomian”



Gambar 1.7 Foto Belajar Bersama

“Suatu negara yang berhasil membangun manusianya, berarti negara itu sudah berhasil merencanakan sekaligus membangun masa depannya”

3. Analisis tipologi Klassen (Analisis Kuadran) capaian pembangunan manusia di Lamongan;
4. Kesimpulan sebagai ulasan penutup termasuk saran atau masukan kepada *stake holder*.

1.4. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dan manfaat dari penyusunan publikasi ini adalah menyajikan informasi atau mengukur tingkat keberhasilan atau kinerja daerah dalam bidang pembangunan manusia sesuai dengan perspektif UNDP di Lamongan. Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan yang tengah terjadi.

Adapun beberapa manfaat penting IPM antara lain sebagai berikut:

- ◆ IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
- ◆ IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Peringkat tersebut bukan sekadar angka semata, namun benar-benar menggambarkan capaian suatu wilayah atau negara di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
- ◆ Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan

sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan sebagai rapor kinerja Gubernur yang tertuang dalam LKPj Gubernur.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lamongan ini terdiri dari 8 bab yang saling berkaitan dan sistematis. Bab I menguraikan mengenai latar belakang penulisan, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, serta sistematika penulisan. Bab II membahas mengenai Metodologi IPM berupa pengertian dan konsep, metode yang digunakan serta penjelasan cara penghitungan indeks tiap komponen serta sumber data yang digunakan. Bab III menjelaskan mengenai potret pembangunan manusia di Kabupaten Lamongan setiap tahunnya. Bab IV menggambarkan Pembangunan Manusia di Lamongan. Bab V menjelaskan mengenai keadaan Kesehatan penduduk Kabupaten Lamongan dilihat dari penolong tenaga persalinan dan keberadaan fasilitas kesehatan. Bab VI menjelaskan potret pendidikan penduduk Lamongan dilihat dari Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Bab VII memberikan informasi gambaran standar hidup layak penduduk Lamongan dilihat dari Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan. Dan Bab VIII membahas terkait Pembangunan Gender di Kabupaten Lamongan.

IPM merupakan indikator utama dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur maupun Bupati/Walikota. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya data IPM dalam menyusun laporan sebagai bahan evaluasi kebijakan pemerintah sekaligus menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.

IPM Metode Baru

Metode baru penghitungan IPM, Angka Melek Huruf (AMH) diganti Harapan Lama Sekolah (HLS), PDB diganti dengan PDB per Kapita, dan menggunakan rumus rata-rata Geometrik



Dimensi IPM

Dimensi Kesehatan

Dimensi ini diukur melalui Umur Harapan Hidup (UHH)



Dimensi Pendidikan

Dimensi ini diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)



Dimensi Pengeluaran

Dimensi ini diukur melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan menggunakan 96 komoditas, terdiri atas 66 komoditas makanan dan 30 komoditas nonmakanan



Klasifikasi Angka IPM



Metodologi

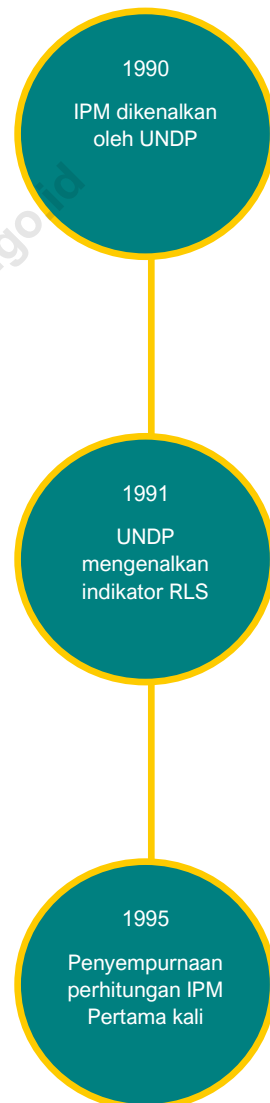
2

2.1. Perubahan Metodologi

Indeks Pembangunan Manusia diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990 oleh salah satu organisasi internasional di bawah naungan PBB, yaitu UNDP (*United Nation Development Programme*). Pada saat itu, indeks komposit ini dihitung dengan pendekatan tiga dimensi, yakni dimensi umur panjang dan hidup sehat (dengan indikator angka harapan hidup saat lahir), dimensi pengetahuan (dengan indikator angka melek huruf dewasa) dan dimensi standar hidup layak (dengan indikator PDB Per kapita). Ketiga dimensi tersebut kemudian dihitung dengan menggunakan rata-rata aritmatik hingga diperoleh indeks pembangunan manusia.

Tidak lama berselang, yaitu pada tahun 1991, UNDP menambahkan indikator rata-rata lama sekolah ke dalam dimensi pengetahuan. Bobot kedua indikator dalam dimensi pengetahuan diberikan berbeda; indikator angka melek huruf diberi bobot dua pertiga, dan indikator rata-rata lama sekolah diberi bobot satu pertiga.

Penggunaan empat indikator dalam dimensi-dimensi penghitungan IPM tersebut bertahan hingga tahun 1994. Karena pada tahun 1995, UNDP kembali melakukan penyempurnaan dalam proses penghitungan IPM dengan mengganti komponen rata-rata





lama sekolah dengan kombinasi angka partisipasi kasar.

Satu dekade dari tahun diluncurkannya, IPM mengalami perubahan yang signifikan dalam proses penghitungannya. Pada tahun 2010, atas dasar rekomendasi dari para ahli, UNDP merubah metodologi penghitungan IPM. Sehingga untuk selanjutnya disebut sebagai IPM Metode Baru.

Dalam metodologi baru, IPM dihitung dari dimensi yang sama namun dengan indikator yang telah diperbaharui sesuai kondisi kekinian yang lebih relevan. Misalnya saja, indikator dalam dimensi pengetahuan, angka melek huruf diganti dengan indikator harapan lama sekolah, dan dalam dimensi hidup layak, indikator Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) perkapita.

Perubahan yang dilakukan oleh UNDP terhadap penghitungan IPM didasari atas kebutuhan bahwa suatu indeks komposit seperti IPM harus mampu menjadi alat ukur yang tepat, dengan pemilihan variabel dan metode yang akurat.

Dua hal paling esensial dari perubahan IPM adalah perubahan pada variabel angka melek huruf dan PDB perkapita dan perubahan metode penghitungan dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Indikator Angka Melek Huruf (AMH) diyakini sudah tidak tepat lagi dijadikan sebagai salah satu tolak ukur pembangunan manusia dari segi kualitas pendidikan.

Hal ini dikarenakan pada saat sebelum perubahan metode IPM, AMH di beberapa wilayah di Indonesia sudah tinggi dan tidak lagi dapat menjadi pembeda antar wilayah. Dengan demikian dianggap bahwa AMH adalah variabel yang tidak sensitif membedakan, dan dalam hal indeks komposit, variabel ini menjadi tidak relevan lagi untuk digunakan sebagai salah satu indikator dalam dimensi pendidikan untuk menghitung IPM.

Indikator kedua yang diganti dalam perubahan metode IPM adalah PDB per kapita. Indikator ini sewajarnya memberi gambaran tentang perkiraan pendapatan masyarakat. Namun yang terjadi adalah PDB terbentuk dari seluruh faktor produksi, baik yang berlangsung dari dalam negeri hingga adanya investasi asing. Dalam arti, nilai tambah yang dihasilkan masih dinikmati oleh non-residen sehingga masih bruto.

Kenyataannya, tidak semua pendapatan faktor produksi yang terlibat dalam penciptaan PDB akhirnya dapat dinikmati oleh masyarakat dalam negeri secara luas. Sehingga disimpulkan bahwa PDB per kapita menjadi tidak mencerminkan kesejahteraan suatu masyarakat di suatu wilayah. Oleh sebab itu, indikator PDB yang terdapat dalam dimensi standar hidup layak digantikan dengan indikator pengeluaran per kapita.

Selain perubahan pada indikator pembentuk IPM, perubahan lain yang dilakukan adalah merombak penghitungan IPM agar lebih relevan dengan kondisi terkini. Penggunaan rumus rata-rata/agregat



Angka Melek Huruf dihapus

PDB digantikan oleh PDB per kapita

Rata-rata aritmetik diganti rata-rata geometrik

“Rata-rata geometrik merupakan rata-rata yang mampu meminimalisir nilai-nilai ekstrem. Dalam artian, rata-rata ini relatif lebih robust dibandingkan rata-rata aritmatik yang besar kemungkinan dipengaruhi oleh indeks penyusun IPM yang ekstrem”

dari ketiga komponen yang awalnya dihitung dengan formula rata-rata aritmatik diganti dengan formula rata-rata geometrik. Dengan rata-rata aritmatik, nilai yang rendah pada suatu dimensi pembentuk IPM dapat ditutupi oleh nilai yang tinggi pada dimensi lain.

Contoh sederhana dari kurang sempurnanya penggunaan rata-rata aritmatik: jika capaian dimensi sehat dan umur panjang, dimensi pengetahuan, dan dimensi standar hidup layak, masing-masing bernilai 1, 3, dan 5, maka rata-rata aritmatiknya adalah 3. Jika masing-masing dimensi nilainya 3, 3, dan 3, maka rata-rata aritmatiknya adalah 3 juga.

Dengan menggunakan rata-rata geometrik, nilai hasil yang diperoleh masing-masing sebesar 2,46 dan 3. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa rata-rata geometrik lebih dapat menggambarkan ketimpangan nilai pada dimensi pembentuk IPM daripada rata-rata aritmatik.

Ketimpangan antardimensi pembentuk justru bertentangan dengan konsep dan tujuan pembangunan manusia. IPM yang ideal adalah yang menjunjung pemerataan dalam pembangunan manusia atau dengan kata lain anti terhadap ketimpangan pembangunan.

Atas dasar inilah kemudian metode penghitungan rata-rata ketiga dimensi IPM diganti dengan menggunakan rata-rata geometrik. Pada formula pengganti ini, setiap dimensi berbobot sama dan tidak memungkinkan adanya transfer capaian dari dimensi yang bernilai tinggi ke dimensi yang bernilai rendah.

2.2. Mengapa metodologi IPM diubah?


Adapun beberapa alasan yang melandasi perubahan metodologi penghitungan IPM adalah:

1. Beberapa indikator sudah tidak tepat dalam penghitungan IPM. Angka Melek Huruf sudah tidak lagi relevan dalam mengukur capaian pembangunan pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan perbedaan kualitas pendidikan. Selain itu, karena Angka Melek Huruf sebagian besar daerah di Indonesia sudah tinggi, sehingga tidak dapat dijadikan acuan pembeda tingkat pendidikan antar daerah dengan baik.
2. PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. PDB merupakan indikator yang masih bersifat makro dan merupakan agregat dari PDRB kemudian dibagi dengan seluruh populasi penduduk pada pertengahan tahun.
3. Penggunaan rumus rata-rata aritmatika dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi yang lain. Rumus aritmatika yang merupakan rata-rata hitung dipengaruhi oleh salah satu dimensi yang nilainya lebih tinggi sehingga tidak relevan dalam menggambarkan capaian setiap dimensi yang digunakan dalam penghitungan IPM.

2.3. Apa saja yang berubah?

Indikator

1. Angka Melek Huruf pada metode lama diganti



Metodologi IPM diubah karena?

Beberapa indikator tidak tepat

PDB tidak relevan dengan pendapatan

Komponen yang berubah pada metode IPM Baru

1

AMH diganti
AHS

2

PDB per kapita
diganti PNB per
kapita

3

Rata-rata aritmatik
diganti Rata-rata
geometrik

dengan Angka Harapan Lama Sekolah.

2. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

Metode Penghitungan

1. Metode agregasi dengan rumus rata-rata hitung atau aritmatik diubah menjadi rata-rata ukur atau geometrik.

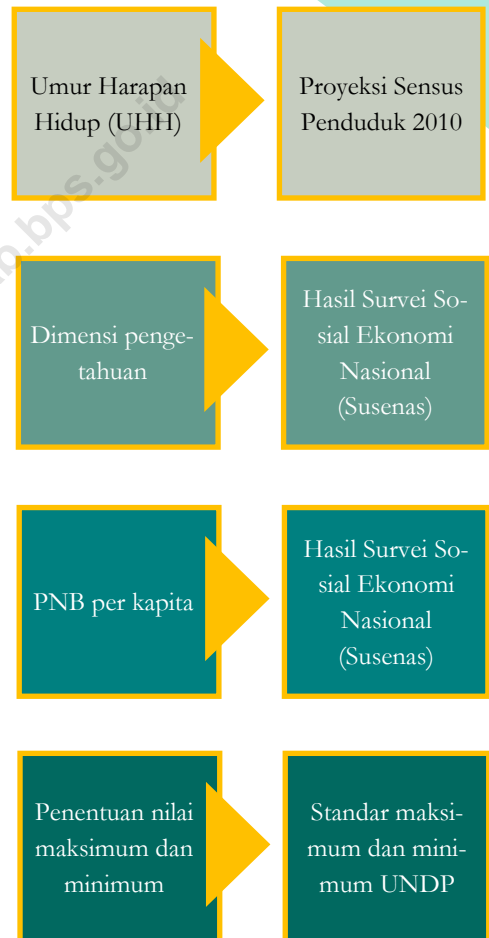
Apa Saja Keunggulan IPM Metode Baru?

1. Menggunakan indikator yang lebih tepat dan mampu membedakan capaian dengan lebih baik. Dengan memasukkan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan mengenai capaian bidang pendidikan dan perubahannya.
2. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian pada dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

2.4. Implementasi IPM Metode Baru di Indonesia

Indonesia mengaplikasikan metode baru penghitungan IPM tersebut pada tahun 2015 dengan memperhatikan beberapa pertimbangan, di antaranya:

1. Untuk dimensi kesehatan, telah tersedia data Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir (e_0) hasil proyeksi Sensus Penduduk (SP2010);
2. Pada dimensi pengetahuan, perubahan indikator perlu dilakukan dengan adanya perubahan penimbang (*weight*) dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang menjadi sumber data penghitungan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Cakupan pengukuran RLS juga mengalami perubahan yang sebelumnya mencakup penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi penduduk usia 25 tahun ke atas. Perubahan tersebut mempertimbangkan kondisi masih banyaknya masyarakat yang menempuh pendidikan rantang usia 15 – 25 tahun;
3. PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga didekati (*proxy*) dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan menggunakan data Susenas;
4. Penentuan nilai maksimum dan minimum menggunakan Standar UNDP untuk keterbandingan global, kecuali standar hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah sebagai acuan.



Dimensi IPM sama halnya dimensi yang digunakan pada IPM Metode Baru, yaitu dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dan dimensi pengeluaran.

Penentuan Nilai Minimum dan Maksimum

Dalam penghitungan IPM, setiap komponen distandarisasi dengan nilai maksimum dan minimum. Penentuan nilai maksimum dan minimum menggunakan standar UNDP untuk masing-masing indikator. Untuk standarisasi kebutuhan hidup layak menggunakan nilai rupiah sehingga dapat dibandingkan secara nasional. Tabel di samping menyajikan standar nilai maksimum dan minimum tersebut.

Penghitungan IPM Metode Baru

IPM merupakan indeks komposit dari tiga dimensi pembangunan manusia, yaitu dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dan dimensi penge-

Tabel 2.1 Nilai Minimum dan Maksimum

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Usia Harapan Hidup	Tahun	20	20	85	85
Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran perkapita yang disesuaikan		100	1.007.436*)	107.721	26.572.352**)
		(PPP US\$)	(Rp)	(PPP US\$)	(Rp)

Keterangan:

*) daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua

***) daya beli maksimum nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2015 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

luaran (standar hidup layak). Penghitungan IPM dilakukan dengan menentukan nilai untuk setiap dimensi, kemudian diagregasi.

Dimensi kesehatan

Dimensi kesehatan diukur dengan menggunakan umur harapan hidup saat lahir (UHH). UHH mencerminkan derajat kesehatan masyarakat sebagai suatu indikator mengenai peluang lama usia hidup. UHH dihitung dari hasil proyeksi Sensus Penduduk SP2010 yang dilakukan secara tidak langsung melalui paket program *Mikeco Computer Program for Demographic Analysis* (MCPDA) atau *Mortpack*. Indeks kesehatan sendiri dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$I_{Kesehatan} = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{max} - UHH_{min}}$$

Dimensi pendidikan

Dimensi pendidikan atau bisa disebut juga dimensi pengetahuan diukur melalui dua indikator, yaitu angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah (HLS) atau disebut juga *Expected Years of Schooling* (EYS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu di masa mendatang.

Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) atau disebut juga *Mean Years of Schooling* (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Indeks pengetahuan secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$I_{pengetahuan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$



Gambar 2.1 Aktivitas Outbond Murid Sekolah

Tingkat pendidikan Lamongan yang semakin meningkat menjadikan dimensi pendidikan menjadi salah satu pemicu tingginya angka IPM Lamongan.

Di mana:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

Dimensi pengeluaran

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga kabupaten/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan (riil) dengan tahun dasar 2012 sama dengan 100.

Penghitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas di mana 66 komoditasnya merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Adapun Teknik penghitungan paritas daya beli ini menggunakan teknik Rao. Pada metode lama, terdapat 27 komoditas yang digunakan dalam menghitung *Purchasing Power Parity* (PPP). Sedangkan pada metode baru, dipilih sebanyak 96 komoditas dalam penghitungan PPP dengan pertimbangan bahwa *share* 27 komoditas (metode lama) terus menurun dari 37,52 persen pada tahun 1999 menjadi 24,66 persen pada tahun 2012. Indeks pengeluaran (standar hidup layak) dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran})_{min}}{\ln(\text{pengeluaran})_{max} - \ln(\text{pengeluaran})_{min}}$$



Gambar 2.2 Pawai HUT Kemerdekaan RI

Dimensi pengeluaran diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran per kapita konstan dengan tahun dasar 2012 sebagai 100. Rata-rata tersebut dibuat konstan untuk menghilangkan pengaruh inflasi terhadap nilai pengeluaran. Dan selanjutnya agar terbanding antar wilayah, digunakanlah harga-harga Jakarta Selatan sebagai acuan utama.

2.5. Penghitungan IPM

IPM dihitung dengan menggunakan rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$$

Pada metode lama, agregasi indeks komposit menggunakan rata-rata aritmatik. Sementara pada metode baru menggunakan rata-rata geometrik. Metode agregasi indeks komposit yang digunakan pada metode baru merupakan penyempurnaan metode lama.

Seperti pada penjelasan sebelumnya, rata-rata geometrik memiliki keunggulan dalam mendeteksi ketimpangan dibanding rata-rata aritmatik.

Ukuran Kecepatan IPM

Kecepatan perubahan IPM juga menjadi salah satu fokus dalam pembangunan manusia. Pada metode lama, kecepatan perubahan IPM diukur dengan menggunakan reduksi *shortfall*. Pada metode baru, kecepatan perubahan IPM diukur dengan menggunakan pertumbuhan aritmatik.

Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian pada periode sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, maka dapat dikatakan IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya se-

“ Sebelum perubahan metodologi, untuk menilai progress pembangunan manusia di suatu wilayah biasanya menggunakan angka reduksi *shortfall*. Reduksi *shortfall* menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian yang harus ditempuh untuk mencapai titik IPM ideal (100) ”

makin cepat.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100$$

Di mana:

IPM_t : adalah IPM suatu wilayah pada tahun ke- t ;

IPM_{t-1} : adalah IPM suatu wilayah pada tahun ke- $t-1$;

Setelah terjadi perubahan metode penghitungan IPM, ukuran yang digunakan untuk melihat capaian pembangunan manusia suatu wilayah adalah kecepatan IPM dengan menghitung pertumbuhannya.

Pengklasifikasian Pembangunan Manusia Berdasarkan IPM

Untuk mengklasifikasikan capaian pembangunan manusia suatu wilayah, diperlukan sebuah ukuran yang mampu membedakan tingkat capaian pembangunan manusia antar wilayah. Pengklasifikasian pembangunan manusia ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

Adapun capaian IPM suatu wilayah dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori, yaitu:

1. Sangat tinggi (Angka IPM lebih dari atau sama dengan 80)
2. Tinggi (Angka IPM lebih dari atau sama dengan 70 dan kurang dari 80)
3. Sedang (Angka IPM lebih dari atau sama dengan 60 dan kurang dari 70)
4. Rendah (Angka IPM kurang dari 60)



Gambar 2.3 Aktivitas Karyawan Pabrik

3.1. Hakikat Pembangunan

Hakikat utama pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan rakyat. Hasil pembangunan diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh elemen masyarakat. Terlebih lagi, fokus tujuan nasional 2019-2024 salah satunya adalah menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul untuk Indonesia Maju.

Tanpa peningkatan kualitas SDM, pembangunan yang telah dilakukan selama ini akan sia-sia. Sayangnya, masih banyak orang berpendapat bahwa pembangunan yang utama adalah pembangunan fisik atau infrastruktur.

Pembangunan yang hakiki itu adalah pembangunan yang berimplikasikan peningkatan kualitas manusia bercirikan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pembangunan menjadi tidak berarti jika masyarakat tidak ikut andil dalam keseluruhan proses pembangunan. Rakyat bukan hanya sebagai alat untuk mencapai hasil akhir pembangunan, tetapi juga sebagai tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri.

Untuk mewujudkan itu, sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas sangat dibutuhkan dalam menunjang pembangunan berkualitas. Pembangunan di beberapa negara maju sangat ditopang oleh masyarakat bersumber



Gambar 3.1 Penguasaan Teknologi

Pembangunan melibatkan manusia sebagai subyek, predikat, dan obyek. Manusia sebagai subyek berarti manusia terlibat dalam melakukan perencanaan pembangunan. Manusia sebagai predikat berarti manusia sebagai eksekutor pembangunan. Manusia sebagai obyek berarti manusia sebagai sasaran pembangunan dan manusia pula yang menikmati hasil pembangunan itu.

“Kesejahteraan akan tercapai apabila pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat dan memberi dampak positif pada aspek kesehatan, pendidikan, serta kehidupan yang layak”

daya manusia yang baik. Pembangunan di negara-negara maju jauh lebih berhasil dibanding negara lainnya karena didukung oleh sumber daya manusia yang sangat berkualitas.

Kualitas manusia suatu bangsa sangat berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia, utamanya aspek kesehatan, pendidikan atau pengetahuan, dan kesejahteraan ekonomi. Ketiga aspek tersebut menjadi penentu kuantitas sekaligus kualitas manusia sebagai dampak pembangunan. Pembangunan menjadi sangat berarti jika ketiga aspek tersebut juga dapat dinikmati masyarakat seiring percepatan perkembangan pembangunan daerah.

Kesejahteraan akan dirasakan masyarakat jika pembangunan yang terjadi dapat memberikan implikasi pada tercapainya umur panjang dan sehat, pendidikan atau pengetahuan semakin meningkat, serta kehidupan yang layak secara ekonomi.

3.2. Pembangunan Lamongan

Terkait pembangunan manusia, Pemerintah Kabupaten Lamongan berupaya melakukan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan kualitas SDM.

Berbagai program peningkatan pembangunan yang membawa kualitas manusia telah diupayakan, baik dari sisi kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, pembangunan infrastruktur juga terus digulirkan agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh elemen masyarakat.

Terlihat jelas bahwa sejak 2015, IPM Lamongan menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2015, IPM Lamongan masih berada pada angka 69,84 poin. Dalam kurun waktu 7 tahun, IPM Lamongan mampu mencapai angka 73,12 poin pada tahun 2021. Data ini menunjukkan dampak positif program pemerintah Lamongan baik di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi telah dirasakan oleh masyarakat sebagai obyek pembangunan.

Secara rata-rata, kenaikan IPM Lamongan setiap tahunnya mencapai 0,55 poin selama 2015 hingga 2021. Artinya, kebijakan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran per kapita cukup baik. Selain menjadi prestasi, kondisi di atas juga menjadi tantangan tersendiri bagi Lamongan bagaimana capaian IPM setiap tahunnya dapat diiringi dengan peningkatan kualitas pembangunan yang tecermin dari pelayanan masyarakat dan mempermudah akses pendidikan, kesehatan, sehingga *multiplier effect*-nya dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat.

Selama pandemi Covid-19 berlangsung hingga saat ini, efeknya terhadap IPM belum signifikan. Walaupun di tahun 2020, pengeluaran per kapita per tahun Lamongan menurun dibandingkan periode sebelumnya, tetapi secara agregat IPM tetap meningkat. Pandemi Covid-19 juga tidak berdampak besar pada angka kematian bayi sehingga tidak berdampak buruk pada aspek Kesehatan. Pandemi Covid-19 juga tidak mengu-



Gambar 3.2 Aktivitas Karyawan Pabrik

bah harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah sehingga dari aspek pendidikan juga cenderung tetap.

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) LAMONGAN TAHUN 2021

Umur Harapan Hidup Saat Lahir
72,49 tahun



IPM 73,12
TAHUN 2021

Rata-rata Lama Sekolah
8,04 tahun
Harapan Lama Sekolah
13,77 tahun



Pengeluaran per Kapita per Tahun yang Dsesuaikan
Rp11.510.000,00



PERTUMBUHAN IPM 2021

▲ 0,54%



Kategori IPM

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Rendah



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LAMONGAN
<http://bps.lamongankab.go.id>

Pembangunan Manusia di Lamongan

4

Pembangunan manusia di Lamongan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal tersebut ditunjukkan dari kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebagai salah satu indikator *outcome* pembangunan, IPM tidak hanya meninjau satu bidang saja, tetapi merupakan komposit bidang sosial dan ekonomi.

4.1. Perkembangan IPM Lamongan

Pada tahun 2021, IPM Lamongan mencapai 73,12 atau meningkat sebesar 0,54 poin jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 72,58 poin. Dengan kata lain, pembangunan manusia di Lamongan pada tahun 2021 meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 0,74 persen poin. Kondisi ini sekaligus menunjukkan adanya pemulihan Lamongan pasca puncak Pandemi Covid-19.

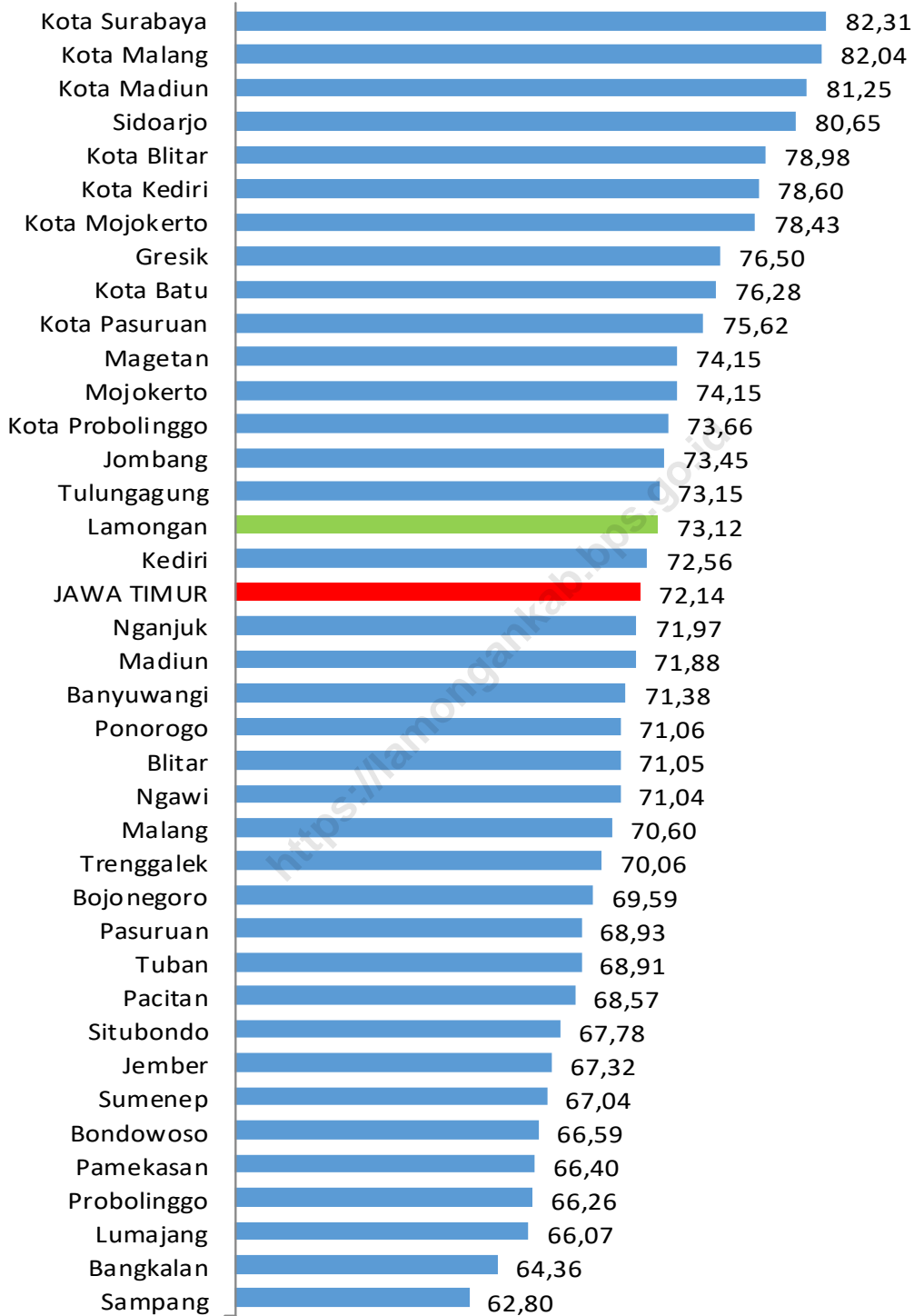
Dengan tingkat IPM tersebut, Kabupaten Lamongan tergolong dalam kategori “tinggi” dalam hal pembangunan manusia, perlambatan laju IPM di tahun 2020 agaknya telah pulih yang ditandai dengan meningkatkan seluruh komponen penyusun IPM pada tahun 2021. Sebagai indikator *outcome* jangka panjang, pandemi Covid-19 tidak begitu memberi dampak negatif terhadap IPM, namun dampak pandemi terdeteksi pada pengeluaran riil per kapita per tahun.

Pada Tahun 2021, Kabupaten Lamongan menempati posisi ke-16 dari 38 kabupaten/kota



Grafik 4.1 IPM Lamongan Tahun 2015-2021

Pembangunan manusia di Lamongan rata-rata mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini seiring dengan pesatnya pembangunan di berbagai bidang, baik infrastruktur maupun suprastruktur. Pendidikan dan pelayanan kesehatan yang ditopang dengan SDM yang melimpah membuat Lamongan menjadi salah satu provinsi terbaik di In-



Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 4.2 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur, Tahun 2021

di Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan Kabupaten Lamongan di tingkat Provinsi masih berada di tengah. Untuk Provinsi Jawa Timur, Kabupaten/Kota dengan nilai IPM tertinggi adalah Kota Surabaya dengan nilai IPM sebesar 82,31, sedangkan kabupaten/kota dengan nilai IPM terendah adalah kabupaten Sampang dengan nilai IPM sebesar 62,80.

4.2. Pertumbuhan IPM

Percepatan kualitas pembangunan manusia tidak lagi diukur dari indikator reduksi *shortfall* per tahun, tetapi dilihat berdasarkan pertumbuhan IPM antar waktu. Semakin besar angka pertumbuhan IPM suatu daerah dapat dimaknai semakin cepat pencapaian pembangunan manusia di daerah tersebut.

IPM Lamongan pada tahun 2021 sebesar 73,12 poin, atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (72,58) atau tumbuh

sebesar 0,54 poin. Pembangunan manusia yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan selama tahun 2021 menunjukkan hasil yang positif. Capaian ini juga tidak lepas dari upaya pemerintah menggulirkan sejumlah bantalan ekonomi di tengah Pandemi Covid-19 untuk menjaga daya beli masyarakat terkendali dan ekonomi tetap tumbuh.

Konteks ekonomi yang tumbuh tersebut dimaksudkan bukan hanya dinikmati oleh sebagian penduduk yang berpendapatan menengah ke atas saja, melainkan dinikmati oleh seluruh elemen masyarakat. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (inklusif).

4.3. Perbandingan Antar Kabupaten/Kota di Sekitar Kabupaten Lamongan

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di sekitar Kabupaten Lamongan, nilai

Kabupaten	UHH	HLS	RLS	Pengeluaran per kapita (Ribu Rupiah)	IPM	Peringkat se Jawa Timur
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mojokerto	72,59	12,95	8,64	12.844	74,15	11
Bojonegoro	71,72	12,68	7,38	10.221	69,59	26
Tuban	71,56	12,22	7,18	10.380	68,91	28
Lamongan	72,49	13,77	8,04	11.510	73,12	16
Gresik	72,67	13,77	9,56	13.280	76,50	8

Tabel 4.1 Perbandingan Komponen Penyusun IPM Kabupaten Lamongan dan Kabupaten/Kota di Sekitarnya, Tahun 2021



Gambar 4.1 Aktivitas Jual-Beli Buah-buahan

IPM Kabupaten Lamongan lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Gresik dan Kabupaten Mojokerto, namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro.

Dilihat dari Usia Harapan Hidup, Kabupaten Lamongan masih tertinggal dibandingkan Kabupaten Gresik dan Kabupaten Mojokerto dimana Usia Harapan Hidupnya masing-masing mencapai 72,67 tahun dan 72,59 tahun. Kondisi ini kemungkinan disebabkan karena sarana dan prasarana kesehatan di kedua kabupaten tersebut lebih memadai.

Untuk Harapan Lama Sekolah mendekati sama dengan Kabupaten Gresik sedangkan untuk rata-rata lama sekolah di Kabupaten Lamongan masih berada di bawah Kabupaten Gresik dan Kabupaten Mojokerto.

Pengeluaran per kapita Kabupaten Lamongan cukup berbeda jauh dibandingkan Kabupaten Gresik dan Kabupaten Mojokerto yang nilainya cukup tinggi. Gaya hidup masyarakat perkotaan yang lebih bervariasi dalam pola konsumsinya menjadi salah satu alasan mengapa pengeluaran per kapita menjadi lebih tinggi.

5.1. Definisi dan Manfaat Hidup Sehat

Kesehatan menjadi aspek penting dalam pembangunan, karena kesehatan menjadi modal penting bagi setiap individu untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Sehat menurut Kemenkes RI memiliki definisi sendiri mengenai sehat dan bugar. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehat adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sehat diperlukan agar setiap individu merasa nyaman, aman dan bebas dalam melakukan apa yang diinginkannya dengan leluasa.

Upaya peningkatan kualitas kesehatan yang dilakukan pemerintah saat ini tidak hanya terfokus pada upaya pengobatan atau upaya kuratif dan rehabilitasi saja. Peningkatan pelayanan kesehatan juga dilakukan dengan upaya promotif dan preventif dan upaya tersebut menjadi salah satu pilar utama program Indonesia Sehat.

Sosialisasi dan edukasi akan pentingnya menjaga kesehatan individu dan masyarakat terus diupayakan untuk peningkatan derajat kesehatan. Pengenalan berbagai macam jenis penyakit yang tidak menular maupun menular, gejala-gejala yang



Gambar 5.1 Tes Covid-19

“ Sinergi antara pembangunan manusia dan partisipasi masyarakat menjadi salah satu strategi pembangunan nasional. Demikian halnya pembangunan dalam bidang kesehatan, sehingga menjaga kesehatan dalam upaya pembangunan bidang kesehatan tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan juga menjadi tanggung jawab setiap individu “



Gambar 5.2 Pemakaian Masker selama Pandemi Covid-19

timbul, cara penularan, penanganan dan pengobatan cara-cara pencegahan, serta dilakukannya pemberdayaan masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat merupakan upaya promotif dan preventif. Upaya promotif dan preventif diharapkan dapat mengurangi resiko penularan penyakit (prevalensi penyakit) dan mampu menurunkan tingkat kematian akibat penyakit, khususnya penyakit berat dan penyakit menular.

5.2. Tren Usia Harapan Hidup

Peningkatan UHH penduduk di Lamongan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan derajat kesehatan penduduk Lamongan. Hal tersebut, tentunya tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan yang terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dan juga peran aktif penduduk Lamongan dalam meningkatkan kualitas kesehatan individu maupun kesehatan masyarakat.

Kegunaan UHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. UHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program social lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi, dan kalori termasuk pemberantasan kemiskinan.

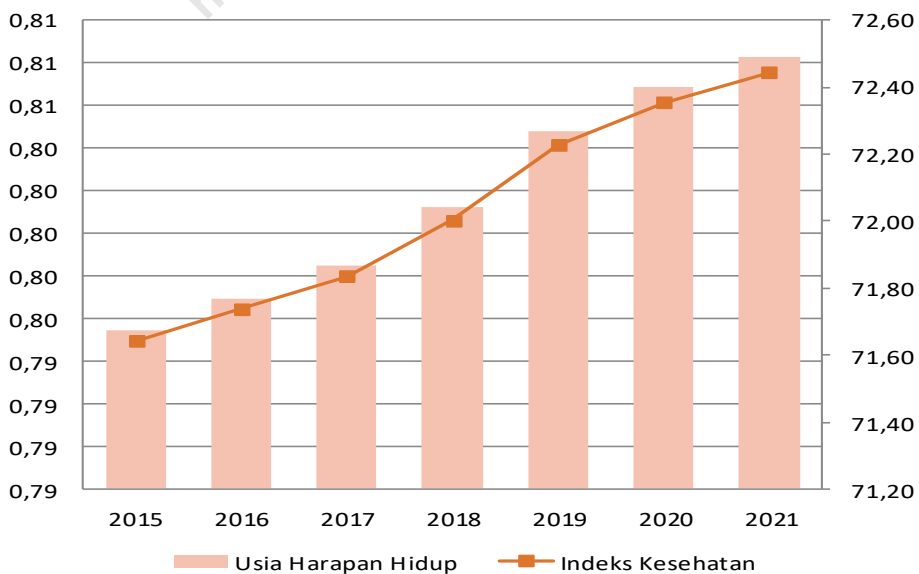
Umur harapan hidup penduduk Lamongan pada tahun 2021 adalah 72,49 tahun, artinya rata-rata harapan hidup bayi yang lahir pada tahun

2021 dapat mencapai umur 72,49 tahun. Apabila dibandingkan dengan rata-rata harapan hidup bayi yang lahir pada tahun 2015, bayi yang lahir pada tahun 2021 memiliki kenaikan harapan hidup yang cukup signifikan yaitu 0,82 tahun lebih lama.

Angka Harapan Hidup saat lahir berhubungan erat dengan Angka Kematian Bayi. Angka Kematian Bayi (AKB) digunakan untuk mencerminkan derajat kesehatan di suatu masyarakat. Semakin tinggi Angka Harapan Hidup maka semakin rendah tingkat kematian bayi. Rendahnya Angka Kematian Bayi sejalan dengan rendahnya pelayanan kesehatan di masyarakat dan ketidakmampuan secara ekonomi. Selain itu, untuk melihat kondisi turunnya angka kematian bayi juga dapat dilihat dari tenaga penolong persalinan.



Gambar 5.3 Peralatan Medis



Grafik 5.1. Perkembangan Umur Harapan Hidup dan Indeks Kesehatan Penduduk Lamongan 2015-2021



Gambar 5.4 Bayi baru lahir

Penolong persalinan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keselamatan ibu dan bayinya. Persalinan yang dilakukan oleh tenaga medis seperti dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya akan lebih aman dibanding dengan persalinan yang ditolong oleh tenaga non medis seperti dukun. Tenaga kesehatan sudah dipersiapkan untuk memberikan perawatan yang komprehensif untuk wanita selama masa reproduktifnya.

Dengan ditolongnya oleh tenaga kesehatan, maka harapan angka kematian bayi akan semakin berkurang dan kesehatan reproduksi semakin meningkat. Pada tahun 2021, perempuan yang persalinannya dibantu oleh tenaga Kesehatan/medis di Lamongan mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua perempuan persalinannya telah dibantu oleh tenaga kesehatan sehingga harapan angka kematian bayi kecil.

Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan di Lamongan memberikan dampak terhadap peningkatan derajat kesehatan penduduknya. Derajat kesehatan masyarakat yang baik merefleksikan kinerja pembangunan yang baik di bidang kesehatan. Keberadaan fasilitas kesehatan sangat memegang peranan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin mudah masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan yang tersedia, maka diharapkan

Tabel 4.2 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Lamongan, 2021

Fasilitas Kesehatan	Jumlah
(1)	(2)
Rumah Sakit	16
Poliklinik	67
Puskesmas	33
Puskesmas Pembantu	109

Sumber : BPS - Pendataan Potensi Desa, 2021

semakin berkurang pula tingkat kesakitan (*morbiditas*)

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan akan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang bergerak dalam bidang kesehatan. Pendidikan tenaga kesehatan memegang peranan penting dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan penduduk. Tenaga kesehatan yang profesional dapat meningkatkan kesehatan penduduk (sumber daya manusia) dengan memberikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif sekaligus juga dapat mencerdaskan SDM dengan pelayanan promotif dan preventif dalam bentuk edukasi, sosialisasi, bagaimana menjaga kesehatan individu dan masyarakat. Sebaran ketersediaan tenaga kesehatan di kabupaten/kota se-Lamongan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Sama halnya dengan penyebaran fasilitas kesehatan di kabupaten Lamongan, ketersediaan tenaga kesehatan yang meliputi keberadaan dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, perawat dan bidan juga sangat berpengaruh pada aspek kesehatan masyarakat.



Gambar 5.5 Rumah Sakit Umum Daerah di Lamongan

Pendidikan

6

Pendidikan atau pengetahuan merupakan komponen penting dalam pembangunan manusia. Indikator-indikator sederhana yang meliputi tingkat pendidikan rata-rata penduduk dan harapan lama sekolah merupakan determinan penting IPM. Meski sekilas nampak sederhana, capaian indikator sederhana tersebut berimplikasi dalam hal kesiapan dan kapasitas manusia untuk berperan tidak hanya menjadi obyek pembangunan tetapi juga sekaligus menjadi subyek dan *ultimate beneficiary* pembangunan itu sendiri.

Pada bagian ini akan diulas mengenai status pembangunan pendidikan Lamongan berdasarkan data, indikator, dan analisisnya, khususnya dalam konteks kontribusinya terhadap capaian pembangunan manusia sebagaimana diukur dengan IPM. Namun, analisis akan disajikan lebih dari sekadar menjelaskan perannya dalam mempengaruhi IPM, tetapi dalam konteks pembangunan secara umum. Indikator yang digunakan merupakan alat ukur yang menunjukkan status pembangunan pendidikan, yaitu angka partisipasi sekolah, rata-rata lama bersekolah, harapan lama sekolah, dan lainnya sampai dengan sarana dan tenaga pendidikan.

Telaah yang lebih luas ini diharapkan dapat memberi manfaat lebih jauh, khususnya dalam kaitan kepentingan perencanaan pembangunan di



Gambar 6.1 Foto anak Sekolah Dasar

Pada dasarnya, aspek pendidikan menjadi aspek utama sebagai pembentuk IPM. Sebab, pendidikan yang tinggi dan berkualitas akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan memberi peluang besar untuk meningkatkan kemampuan ekonominya.

bidang pendidikan dan sumber daya manusia pada umumnya.



Grifik 6.1 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Lamongan Tahun 2015-2021

Dua indikator utama penyusun indeks pendidikan komponen IPM adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS dihitung berdasarkan rata-rata berapa lama seseorang mengenyam pendidikan, sedangkan HLS dihitung dengan menanyakan berapa lama harapan mengenyam pendidikan.

Taraf pendidikan penduduk diukur dengan berbagai pendekatan. Cara yang cukup sederhana adalah dengan mengukur harapan lama sekolah dan rata-rata lama tahun bersekolah penduduk. Cara yang lebih rinci adalah dengan melakukan disa-

gregasi dan mengelompokkan penduduk berdasarkan jenjang pendidikan yang diselesaikannya.

Harapan lama sekolah (*expected years of schooling*) memberikan gambaran lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka rata-rata lama tahun bersekolah (*mean years of schooling*) memberikan gambaran umum secara agregat tingkat pendidikan yang diselesaikan dan tingkat keterampilan penduduk secara umum.

Indikator pendidikan Lamongan terus menunjukkan peningkatan. Indikator Harapan Lama Sekolah Lmaongan pada tahun 2021 telah mencapai 13,77 yang berarti secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan for-

mal pada tahun 2021 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,77 tahun atau setara lulusan Diploma I. Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) meningkat dari 13,48 tahun pada tahun 2020 menjadi 13,77 tahun pada tahun 2021. Selama periode 2015 hingga 2021, HLS Kabupaten Lamongan telah meningkat sebesar 0,34 tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang telah semakin membaik.

Tren perbaikan indikator Pendidikan juga terlihat dari Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas. Angka RLS Lamongan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2021 RLS Lamongan mencapai 8,04 tahun, artinya rata-rata penduduk Lamongan usia 25+ bersekolah hingga kelas 2 SMP. Angka ini menunjukkan masih belum tercapainya program wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan lama oleh pemerintah.

Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat dari 7,92 tahun pada tahun 2020 menjadi 8,04 tahun pada tahun 2021. Selama periode 2015 hingga 2021, RLS Kabupaten Lamongan telah meningkat sebesar 0,76 tahun.

Terlihat perbedaan yang cukup signifikan



Gambar 6.2 Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Usia Dini

antara Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Lamongan. Hal ini menunjukkan bahwa potensi yang dimiliki Kabupaten Lamongan cukup tinggi yaitu Harapan Lama Sekolah yang mencapai 13,77 tahun atau setara dengan jenjang perkuliahan Diploma I. Namun pada kenyataannya Rata-rata Lama Sekolah yang telah ditempuh oleh penduduk yaitu sebesar 8,04 tahun atau setara dengan jenjang SMP kelas dua. Hal ini tentu perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah jika ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Salah satunya dengan menangani penduduk putus sekolah agar dapat tertampung dalam program paket yang nantinya jika lulus akan memperoleh ijazah yang setara.

Tabel 4.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal dan Non Formal Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Lamongan, Tahun 2021

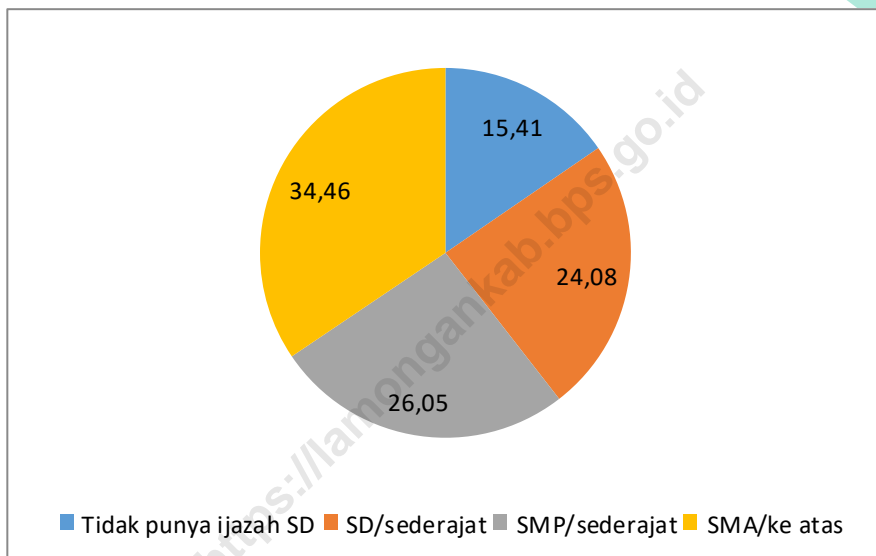
Jenis Kelamin	Kelompok Umur		
	7-12	13-15	16-18
Laki-Laki	99,20	100,00	68,07
Perempuan	99,21	98,62	75,27
Total	99,20	99,31	71,77

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lamongan, 2021

Ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk umur sekolah salah satunya dapat dilihat dari nilai Angka Partisipasi Sekolah (APS). Nilai APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah dari penduduk umur tertentu. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk umur sekolah.

APS terbesar berada pada kelompok umur 13-15 tahun yang merupakan kelompok umur yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan SMP yaitu sebesar 99,31. Angka ini

menunjukkan bahwa hampir semua anak umur 13-15 tahun masih bersekolah. Nilai APS ini menurun seiring dengan meningkatnya kelompok umur. Pada kelompok umur yang beresesuaian dengan jenjang pendidikan SMA/ sederajat (16-18 tahun), nilai APS relatif kecil sebesar 71,77 persen.



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lamongan, 2021

Grafik 6.2 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki di Kabupaten Lamongan, 2021

Pencapaian pendidikan dapat dilihat juga dari persentase penduduk menurut ijazah tertinggi yang dimiliki. Dilihat dari Grafik 6.2, persentase penduduk Lamongan paling besar memiliki ijazah tertinggi SMA/ke atas yaitu sebesar 34,46 persen.

Pendidikan merupakan sebuah kegiatan investasi yang hasilnya tidak dapat dirasakan atau dinikmati secara instan dalam jangka pendek. Output kegiatan pendidikan berupa pen-

ingkatan kualitas modal manusia akan dirasakan pada masa mendatang. Capaian pendidikan masih cukup rendah terutama pada indikator rata-rata lama sekolah, perlu upaya berbagai pihak guna meningkatkan capaian indikator ini.

<https://lamongankab.bps.go.id>

Kehidupan yang Layak

7

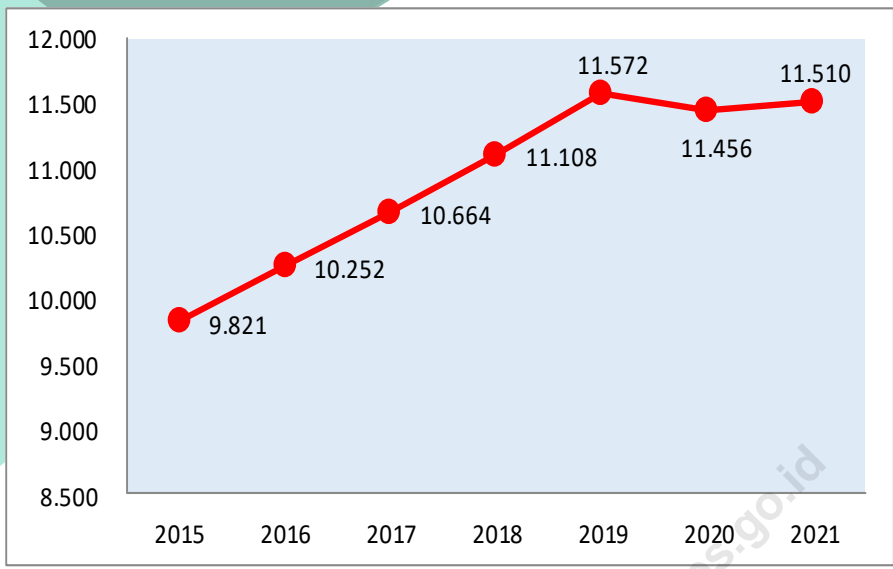
Paradigma baru dalam pembangunan manusia yang dikenalkan oleh UNDP menekankan pada proses untuk memperluas pilihan bagi penduduk (*enlarging the choice of people*), salah satunya adalah mencapai kehidupan layak yang sesuai dengan keinginan. Standar hidup layak tersebut digambarkan melalui tingkat pendapatan. Pendapatan merupakan alat untuk menguasai sumber daya agar dapat hidup dengan layak. Semakin besar pendapatan, maka semakin besar pula jumlah barang dan jasa yang tersedia untuk mendukung standar hidup yang layak. Sumber daya tersebut merupakan perantara untuk meningkatkan kemampuan individu dari segi pendidikan, keterampilan, kesehatan, kemampuan dalam pergaulan di masyarakat, dan lain-lain.

Dalam konteks inilah, pendapatan sebagai pendekatan dari tingkat hidup yang layak, dipilih sebagai salah satu indikator pembangunan manusia. Namun, seringkali indikator pendapatan ini sangat sulit didapatkan karena seringkali *under estimate* sehingga diperlukan sebuah indikator yang mendekati indikator pendapatan. Di dalam penghitungan IPM, dimensi standar hidup layak dicerminkan oleh indikator pengeluaran riil per kapita disesuaikan yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*).



Gambar 7.1 Potret Kerumunan Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi strategi utama pembangunan di Indonesia dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.



Grafik 6.1 Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan (Ribu Rupiah) di Kabupaten Lamongan, 2015-2021

Capaian indikator pengeluaran riil per kapita per tahun disesuaikan Lamongan selama 2015-2021 menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2015 nilainya sebesar 9.821 ribu rupiah dan terus meningkat pada tahun berikutnya sehingga mencapai 11.572 ribu rupiah pada tahun 2019.

Pandemi Covid-19 yang melanda pada tahun 2020 menyebabkan penurunan nilai pengeluaran per kapita per tahun di Lamongan sebesar 1,00 persen. Namun, kondisi tersebut mengalami perbaikan seiring meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat di tahun berikutnya. Pada tahun 2021, indikator pengeluaran Lamongan mencapai 11.510 ribu rupiah, meningkat 0,47 persen dibanding periode sebelumnya.

Dimensi standar hidup layak dalam IPM digambarkan melalui indeks pengeluaran riil per kapita disesuaikan.

Indeks Pengeluaran

Dalam pembentukan IPM, indikator pengeluaran riil per kapita disesuaikan disajikan dalam bentuk indeks pengeluaran. Semakin tinggi nilai indeks pengeluaran menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebu-

tuhannya semakin baik. Pada tahun 2021, indeks pengeluaran Lamongan sebesar 0,74 atau tercatat naik tipis dibanding tahun 2020.

Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan timbal balik dengan pembangunan manusia. Untuk menjamin kualitas pembangunan suatu negara, pembangunan manusia harus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.

<https://lamongankab.bps.go.id>

<https://lamongankab.bps.go.id>

Pembangunan Gender

8

Dalam laporan pembangunan manusia tahun 1995 UNDP menegaskan bahwa pembangunan manusia harus menerapkan empat komponen penting, yakni produktifitas, kesetaraan, kesinambungan, dan pemberdayaan.

Dalam kaitannya dengan pembangunan gender, maka komponen yang patut menjadi perhatian adalah kesetaraan dan pemberdayaan. Bahwa setiap orang harus mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari pembangunan, tanpa melihat gender, disabilitas, status ekonomi, tingkat pendidikan, dan tempat lahir. Dalam hal pemberdayaan, setiap orang harus terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupannya. Pembangunan harus berawal dari rakyat, bukan hanya untuk rakyat.

Perempuan selama ini menjadi pihak yang kesempatan, kapasitas, dan akses sumber dayanya relatif terbatas dibanding laki-laki. Hal ini secara tidak sadar terbentuk oleh ekspektasi di masyarakat dan keberadaan norma-norma sosial. Masyarakat berharap perempuan bisa menjadi pengurus rumah tangga dan anggota keluarga lain sehingga peluang perempuan untuk membuka pintu-pintu kesempatan seakan-akan terbatas.

Bank Dunia (2012) mengamati bahwa ketimpangan gender terjadi di berbagai belahan

Istilah gender tidak mengacu atau menggantikan istilah perempuan, tapi menggambarkan laki-laki dan perempuan keduanya (Handayani dan Pardede, 2017). Lebih lanjut, mereka menggarisbawahi bahwa kesetaraan bermakna equity (kesamaan) dan equality (perlakuan yang adil dan setara)

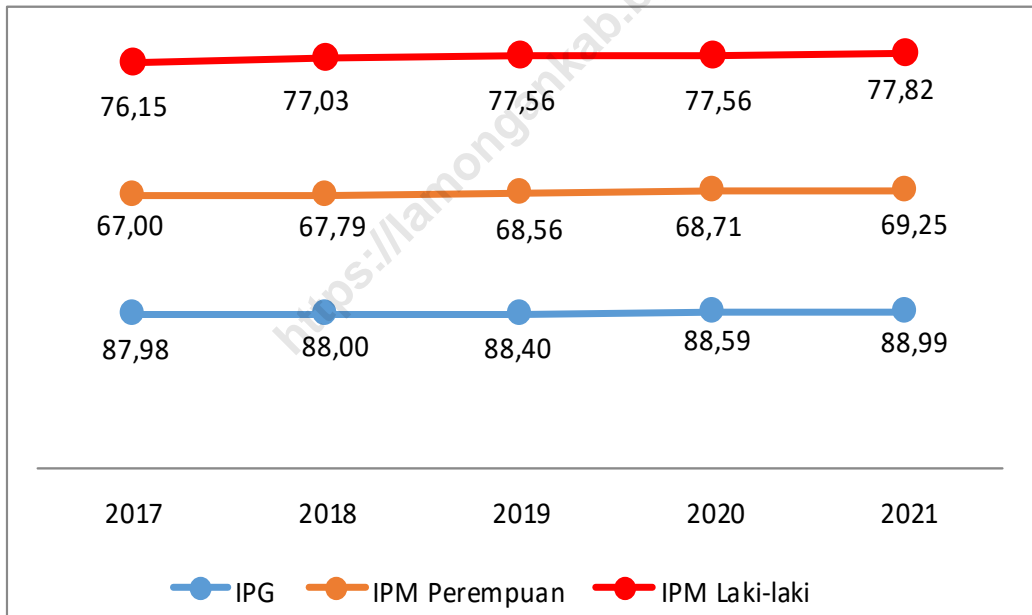


Gambar 8.1 Simbol Gender

UNDP sendiri menegaskan bahwa jika pembangunan tidak memperhatikan aspek gender, maka akan sangat berbahaya (*development, if not engendered, is endangered*). Artinya, pembangunan manusia dikatakan berhasil jika potensi setiap individu termanfaatkan secara keseluruhan.

dunia dalam berbagai dimensi kehidupan dan siklus hidup. Kadang hal tersebut merugikan laki-laki, namun sebagian besar merugikan perempuan. Sebagai kesimpulan, ketimpangan gender merupakan akibat dari interaksi di tingkat rumah tangga, pasar, dan institusi.

Padahal, keterlibatan perempuan dalam perekonomian berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi mengingat jumlahnya yang separuh populasi (Bank Dunia, 2012). Sayangnya, keterlibatan perempuan dalam perekonomian



Sumber: BPS Kabupaten Lamongan

Gambar 8.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Lamongan Tahun 2010-2021

masih berstatus sebagai pekerja keluarga dan pekerja tidak dibayar. Selain itu, pemberdayaan gender juga akan mempercepat capaian SDGs dan tujuan pembangunan manusia lainnya. Perempuan yang terdidik akan mampu mengontrol fertilitasnya, memelihara kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan; serta mendidik

putra-putrinya. Dengan kata lain, mendidik perempuan berarti menyiapkan generasi penerus yang lebih terdidik dan sejahtera.

Salah satu ukuran untuk mengukur perkembangan pembangunan gender adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPM, IPG, dan IDG mempunyai hubungan erat. IPM mengukur capaian peningkatan kapasitas dasar manusia, sementara IPG secara konsep hampir sama dengan IPM, namun telah mempertimbangkan ketimpangan capaian menurut gender. Jika capaian ini turun atau melebar, maka nilai IPG akan terkoreksi.

Dalam satu lima tahun terakhir, nilai IPG Lamongan periode 2017-2021 cenderung mengalami kenaikan dari 87,98 menjadi 88,99. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk membangun perempuan di Lamongan yang diukur dari dimensi kesehatan, pendidikan, dan daya beli telah menunjukkan hasil. Pada periode tersebut IPM perempuan naik lebih tinggi dibanding IPM laki-laki, masing-masing sebesar 2,25 poin dan 1,67 poin. Diharapkan, perempuan Lamongan menjadi semakin terbuka peluang dan kesempatannya untuk menjadi apa saja yang bermakna dalam hidupnya.

Meningkatnya nilai IPG Lamongan membuat posisi pembangunan gender Lamongan terhadap nasional mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 Lamongan masih menempati urutan 27 di-



Gambar 8.2 Perempuan dalam Lapangan Usaha Perdagangan Makanan, Minuman, dan Tembakau

Keterlibatan perempuan mempunyai nilai intrinsik dan instrumental. Bernilai intrinsik berarti bisa hidup bebas sesuai pilihan dan terpenuhi kebutuhan dasar tanpa melihat atribut gender. Sedangkan nilai instrumental bermakna kesetaraan gender akan mendorong efisiensi ekonomi dan output pembangunan lainnya.

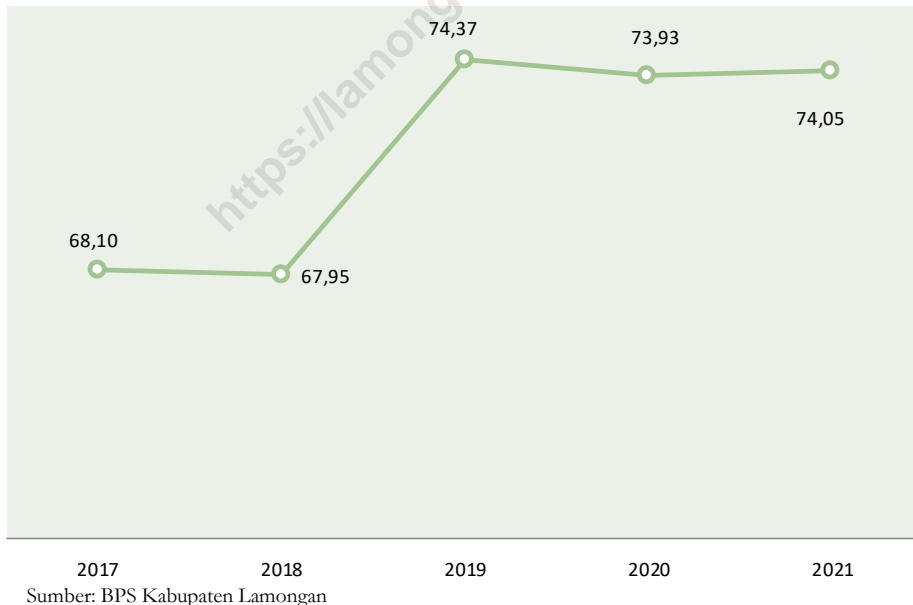
antara kabupaten/kota lain di Jawa Timur, kemudian peringkat ini naik perlahan lima tahun sesudahnya menjadi urutan 26 pada tahun 2021.

Meningkatnya IPM perempuan yang lebih tinggi daripada IPM laki-laki membuat jarak (*gap*) antara IPM laki-laki dan perempuan menjadi semakin sempit sebagaimana terlihat dalam grafik. Pada tahun 2017 jarak IPM laki-laki dan perempuan sebesar 9,15 poin dan jarak ini terus mengecil hingga menjadi 8,57 poin pada 2021.

Dibanding angka IPG, angka IDG relatif lebih berfluktuasi dalam periode 2017-2021. IDG Lamongan pernah turun tajam pada tahun

2018 dan 2020 dan juga pernah naik tajam pada tahun 2020.

Dampaknya, peringkat IDG Lamongan yang awalnya berada di posisi 16 di Jawa Timur kemudian naik menjadi posisi 9 pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan partisipasi perempuan Lamongan dalam dimensi politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan relatif membaik meski nilai IDG mengalami koreksi dalam tiga tahun terakhir.



Gambar 8.3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Lamongan Tahun 2017-2021

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LAMONGAN**

Jl. Veteran No. 185

Telp. (0322) 3103310

Email : bps3524@bps.go.id

Website : lamongankab.bps.go.id